

ABSTRAK

Judul tesis ini adalah “**Implikasi Yuridis Keterlambatan Penyusunan**

Peraturan Daerah Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota”. Latar belakang penulisan tesis ini adalah penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terkait dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyusunannya tidak boleh mengalami keterlambatan, hal ini karena UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sudah menentukan tenggang waktunya.

Permasalahan yang di teliti dalam tesis ini mencakup dua hal yaitu: *Pertama*, bagaimana pengaturan atas keterlambatan penyusunan RAPBD Kabupaten/Kota. *Kedua*, bagaimana dampak bila terjadi keterlambatan penyusunan RAPBD Kabupaten/Kota dikaitkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hokum penelitian yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder.

Hasil penelitian ini menyimpulkan. *Pertama*, Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, (baik UU dan peraturan di bawah UU). Peraturan yang bersumber dari UU misalnya: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Peraturan di bawah UU, misalnya: Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Kedua*, Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Adapun sanksi atas keterlambatan penyusunan Raperda tentang APBD berupa sanksi administratif yaitu tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan, dan saksi tersebut juga dapat berupa pengurangan anggaran dari yang seharusnya diterima.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

ABSTRACT

The title of this thesis is "**Juridical Implications of Delays in the**

Formulation of Local Regulations Concerning the Draft of Regional Government Revenue Expenditure Budget". The background of this thesis is the compilation of drafting of local regulations on Regional Revenue Budget related to the needs and welfare of the community. Therefore, in the preparation should not experience delays, this is because of Law no. 23 of 2014 on Local Government has determined the grace period.

The problems in this thesis include two things: *First*, how to regulate the delay in drafting the RAPBD District / City. *Second*, how will the impact if there is delay in preparation of RAPBD District / City in association with general principles of good governance. The research method used using the approach of legislation and conceptual approach. The legal research materials used are primary legal materials and secondary legal materials.

The results of this study concluded. First, the legislation governing regulation related to the preparation of Regional Revenue Budget (APBD) spread in various laws and regulations (both law and regulations under the Act). Rules derived from the Law for example: Law no. 23 of 2014 on Regional Government, Law No. 17 of 2003 on State moneys, Law No. 1 of 2004 on State Treasury. Regulations under the Act, for example: Government Regulation No. 58/2005 on Regional Financial Management, Regulation of the Minister of Home Affairs No. 22 of 2011 on Guidelines for the Preparation of Regional Revenue and Expenditure Budget. Secondly, the Regional Head and the Regional People's Legislative Assembly shall agree together with the draft Local Regulation on APBD no later than 1 (one) month before the start of the budget year each year. As for sanctions on the delay drafting of local regulations on APBD in the form of administrative sanctions are not paid financial rights set forth in the provisions of legislation for 6 (six) months, and the witness can also be a reduction of the budget than should be accepted.

Keywords: District / City Local Government and Local Budget and Expenditure Budget.